



**KEADILAN EKOLOGIS PENATAAN RUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA**

*(Sebuah Kajian Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang)*

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh:

NAZIF HIDAYATULLAH
NIM. 2320113025

**Pembimbing:
DR. REMBRANDT, SH., M.PD
DR. SYOFIARTI, SH., M. HUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
202**

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No. Reg: /MH/I/2026

KEADILAN EKOLOGIS PENATAAN RUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

(Sebuah Kajian Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)

ECOLOGICAL JUSTICE IN SPATIAL PLANNING UNDER THE JOB CREATION LAW

(A Study of Article 17 of Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law)

Disusun Oleh:

Author:

Nazif Hidayatullah

NIM 2023113025

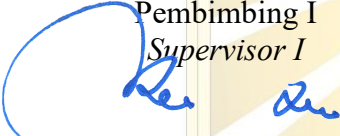
Program Studi : Magister Hukum

Study Program : Master of Law

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 April 2026 Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On July 31st, 2025 And Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:

Pembimbing I
Supervisor I


Dr. Rembrandt, SH., M.Pd.
NIP 196402221990021001

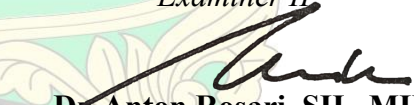
Pembimbing II
Supervisor II


Dr. Syofiarti, SH., M.Hum.
NIP 197405181999032001

Penguji I
Examiner I


Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.
NIP 197505102005011003

Penguji II
Examiner II


Dr. Anton Rosari, SH., MH.
NIP 197502042006041001

Penguji III
Examiner III


Dr. Hengki Andora, SH., LL.M.
NIP 198006162005011003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Dean of Faculty of Law Andalas University

Ketua Program
Magister Hukum
Program Leader Magister of Law

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

KEADILAN EKOLOGIS PENATAAN RUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

(Sebuah Kajian Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)

Nazif Hidayatullah, 2320113025, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hlm. 243, Tahun 2026

ABSTRAK

UU No. 6 Tahun 2023 adalah regulasi yang diproduksi pemerintah untuk kepentingan ekonomi dan investasi. Pasal 17 undang-undang ini mengubah 38 pasal dalam UU No. 26 Tahun 2007 untuk mempermudah pengadaan tanah sebagai langkah strategis dari tujuan pemerintah tersebut. Perubahan ini memantik kekhawatiran terkait menguatnya relasi yang tidak adil antara manusia dan alam dalam konteks tata ruang. Pasalnya, ruang sebagai wadah interaksi unsur biotik dan abiotik harus ditata secara adil. Untuk itu, pengaturan penataan ruang harus mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ekologi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: a) penerapan prinsip keadilan ekologi dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023, dan b) pola distribusi ruang antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 sebagai data utama untuk mendeskripsikan kecenderungan kebijakan penataan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tata ruang tersebut belum mengimplementasikan prinsip keadilan ekologis. Temuan spesifik mengidentifikasi bahwa 86% ketentuan dalam pasal ini dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, yang mengakibatkan lemahnya kekuatan mengikat dan daya paksa secara hukum. Selain itu, Pasal 17 menunjukkan bias regulasi yang signifikan terhadap kepentingan ekonomi (mencapai 46,8% dari total konten). Tren ini dipertegas dengan adanya reduksi denda pidana sebesar 82% bagi korporasi yang melakukan pelanggaran tata ruang yang berakibat pada perubahan fungsi spasial hingga hilangnya nyawa. Tidak adanya regulasi konkret mengenai batas hutan dan kawasan lindung semakin mengonfirmasi rendahnya komitmen ekologis dalam beleid tersebut.

Kata kunci: Keadilan, Ekologi, dan Penataan Ruang.

ECOLOGICAL JUSTICE SPATIAL PLANNING IN JOB CREATION LAW

(A Study of Article 17 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law)

Nazif Hidayatullah, 2320113025, Master of Law Programme, Faculty of Law, Andalas University, p. 243, 2026

ABSTRACT

Law No. 6 of 2023 serves as a regulatory instrument formulated by the government to prioritize economic interests and investment. Through Article 17, this law amends 38 articles of Law No. 26 of 2007 to expedite land acquisition as a strategic measure toward achieving these governmental objectives. These amendments have sparked concerns regarding the intensification of unjust relations between humans and nature within the context of spatial planning. As a domain for the interaction of biotic and abiotic elements, spatial environments must be managed equitably; thus, spatial planning regulations ought to implement the principles of ecological justice. Consequently, this study aims to analyze: (a) the application of ecological justice principles within Article 17 of Law No. 6 of 2023, and (b) the spatial distribution patterns between economic growth interests and environmental protection. Employing a normative juridical research method, this study examines Article 17 of Law No. 6 of 2023 as primary data to describe prevailing trends in spatial planning policy. The findings indicate that the revised spatial regulations fail to implement the concept of ecological justice. Specifically, the study identifies that 86% of the provisions in this article are formulated as declarative statements, resulting in a lack of legally binding force and enforceability. Furthermore, Article 17 exhibits a significant regulatory bias toward economic interests, accounting for 46.8% of its content. This trend is further evidenced by an 82% reduction in criminal fines for corporations committing spatial planning violations that result in spatial functional changes or loss of life. The absence of concrete regulations regarding forest boundaries and protected areas further confirms the diminishing ecological commitment within the legislation

Keywords: *Justice, Ecological, and Spatial Planning.*